

RINGKASAN

Haniah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2015, PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, Dr. Prija Djatmika SH. MS., Milda Istiqomah SH. MTCP.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban pada korporasi dalam hukum pidana, pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya korporasi yang menjadi subyek dalam hukum tetapi dalam beberapa undang-undang tidak mengatur secara jelas tentang bagaimana kedudukan korporasi dalam undang-undangnya termasuk di dalamnya adalah undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Undang-undang tersebut menyebutkan kata korporasi dalam sanksi pidana dengan ketentuan yang tidak atur, maksudnya adalah sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ada yang berisi tentang pidana penjara selama enam bulan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya. Pidana penjara ini tidak terarah kepada siapa di korporasi yang berhak menerimanya sebagai hukuman karena lalainya korporasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sangat memerlukan beberapa perubahan mengenai pasal yang mengatur korporasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1)Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik? (2) Bagaimana reformulasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi korporasi yang melanggar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan undang-undang dengan pemahaman hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, serta membandingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masa kini dan hukum yang berlaku masa lalu atau pada tingkat hirarki peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-Undang Partai politik memerlukan beberapa reformulasi di dalamnya agar menjadi undang-undang yang cukup sempurna untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukumnya dan menjadi undang-undang yang jelas bilamana ada yang melanggar sanksi pidana yang di terapkan.



SUMMARY

Haniah, Criminal Law, Faculty Of Law, University Of Brawijaya, Juli, 2015, REGULATING CRIMINAL ACCOUNTABILITY CORPORATION IN THE LAW NUMBER 2 IN 2011 ABOUT CHANGES TO THE LAW NUMBER 2 IN 2008 ABOUT POLITICAL PARTY, Dr. Prija Djatmika SH. MS., Milda Istiqomah SH. MTCP.

In this thesis, the author raises the issue of accountability on corporations in criminal law, the choice of the theme background by the corporations that are subject to the law but in some laws do not set out clear about how to position the corporation in its laws including Regulating Criminal Accountability Corporation In The Law Number 2 In 2011 About Changes to The Law Number 2 In 2008 About Political Party. The law mentions the word corporation in criminal sanctions with conditions which are not set, meaning the criminal sanctions in Regulating Criminal Accountability Corporation In The Law Number 2 In 2011 About Changes to The Law Number 2 In 2008 About Political Party contains no imprisonment for six months for corporations who commit the criminal offense referred to in the previous article. Imprisonment is not directed to anyone in the corporation are entitled to receive as punishment for corporate lalainya. In addition to Regulating Criminal Accountability Corporation In The Law Number 2 In 2011 About Changes to The Law Number 2 In 2008 About Political Party is in need of some changes regarding the article that governs the corporation.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How does the juridical implications of corporate criminal liability in Regulating Criminal Accountability Corporation In The Law Number 2 In 2011 About Changes to The Law Number 2 In 2008 About Political Party? (2) How reformulation setting corporate criminal liability for corporations that violate article 49 paragraph 1 of Regulating Criminal Accountability Corporation In The Law Number 2 In 2011 About Changesto The Law Number 2 In 2008 About Political Party?

Then the writing of this paper uses the type of juridical-normative research study. This research use approach of law (Statute Approach), Approach comparison (Comparative Approach) approach legislation with the understanding hieraki and principles in the legislation, as well as comparing the laws and regulations that apply today and the law which applies the past or at the level of hireaki legislation.

From the results of research by the above method, the authors obtain answers to existing problems that Act take a concerted political party some reformulation in it to become law is perfect enough to make the corporation as a legal subject and became law when there are clear violates criminal sanctions applied.

